



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bab. 4

SLASAT PERBAIKAN



18.

NIAT MENDORONG EKONOMI RIIL

SALAH satu yang komponen yang mendorong bergerakinya sektor riil disuatu negara adalah adanya pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Sektor swasta yang lesu dapat digairahkan oleh proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan pemborong. Tenaga kerja di perusahaannya mendapat pendapatan dan merupakan pemicu konsumsi. Penyedia barang dan jasa juga mendapat kesempatan memperoleh laba dan pada gilirannya menaikkan konsumsi. Termasuk pendapatan pemerintah itu sendiri dari berbagai jenis pajak yang dikutipnya. Artinya, pengeluaran pemerintah yang berjalan normal dan senantiasa meningkat akan memacu pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Efek lain dari selesainya berbagai proyek pemerintah adalah manfaat yang ditimbulkan proyek tersebut. Sebuah jembatan dibangun akan memperlancar lalu-lintas orang dan barang. Sekolah akan diisi oleh murid-murid dan guru.



Mereka menjadi sasaran pedagang asongan, penjual buku sampul-sampulnya, pakaian sekolah, dan lain-lain. Pemerintah selain berperan kunci sebagai regulator juga menstimulus bergeraknya sektor riil dari investasi langsung yang dilakukannya.

Tahun 2009 total anggaran APBD Riau baik provinsi maupun kabupaten/kota mencapai Rp 13,96 triliun. Belanja langsung sebesar Rp 10,47 triliun sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6,57 triliun. Bila rencana pengeluaran pemerintah daerah ini dapat dimplementasikan dengan baik maka dinamika ekonomi daerah akan terpacu. Sayangnya, akibat berbagai kendala dan keterbatasan pemerintah daerah sendiri tidak semua anggaran belanja yang diancang mampu diwujudkan. Pemerintah Provinsi Riau tahun 2008 lalu masih menyisakan anggaran belanjanya sekitar Rp 815 milyar.

Kalau ditelusuri lebih jauh dana-dana pemerintah yang tidak terpakai di Riau memang cukup besar. Dana tersebut yangkut diperbankan dan fungsinya berubah. Intermediari perbankan dalam mendorong bergeraknya ekonomi tidak sama dengan dorongan yang dilakukan pemerintah. Sebaran Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Riau yang bersumber dari dana Pemerintah Daerah pada Triwulan I 2008 sebesar Rp 5,984 triliun. Di Triwulan I 2009 ternyata jumlahnya tidak kian menyusut. Terjadi kenaikan sehingga mencapai Rp 7,855 triliun. Selama setahun uang pemerintah daerah yang nyangkut di bank naik 37,27 persen. Banyaknya dana pemerintah yang tertanam diperbankan membuat kesempatan masyarakat untuk terangkat perekonomiannya menjadi berkurang.

EDYANUS HERMAN HALIM



Bila diamati transaksi non tunai dalam bentuk *Real Time*

Gross Settlement (RTGS) perbandingan posisi keluar dan posisi masuk kian pincang. Pada Triwulan I 2008 posisi keluar RTGS sebesar Rp 23,994 triliun sedangkan posisi masuk sebesar Rp 17,592 triliun. Nilai Keluar Bersih (*Net Out Flow*) RTGS sebesar Rp 6,402 triliun. Pada Triwulan I 2009 posisi keluar RTGS sebesar Rp 36.905 triliun sedangkan posisi masuk Rp 29,733 triliun. Berarti Nilai Keluar Bersih mencapai Rp 7,172 triliun. Meningkat 152,6 persen jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya. Bila dimasukkan jenis transaksi yang lain, maka jumlah uang yang mengalir dari Riau mungkin jauh lebih besar. Sumbernya bisa dari para pelancong Riau ke luar atau memang diangkut dengan angaja sebagai “uang panas”.

Mencermati dua aspek data di atas berarti kesempatan pemerintah untuk memacu perekonomian daerah masih terbuka. Bila dana tersebut dapat digunakan secara optimal pada asarn investasi pemerintah yang tepat maka perekonomian masyarakat dapat menggeliat. Pemerintah harus memegang prinsip *money follow the function* dalam membelanjakan setiap rupiah yang dimilikinya. Di sini menjadi urgen adanya perencanaan pembangunan yang memadai. Program-program yang disusun harus berdasarkan kebutuhan pengembangan masyarakat sesuai karakteristik dasarnya dan prospek untuk berkembang. Dalam bidang ekonomi diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong percepatan dinamika ekonomi. Pemerintah sebaiknya tidak berbisnis tetapi menanamkan investasinya supaya bisnis masyarakat berjalan dan berkembang.



Besarnya uang yang keluar dari wilayah Riau bisa diminimalkan dengan mempercepat perputaran ekonomi di wilayah ini. *Pertama*, pemerintah mempertajam prioritas pengembangannya pada sektor-sektor yang mampu memperluas kesempatan usaha dan memperbesar kesempatan kerja. *Kedua* adalah penguatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan. Kelompok-kelompok tani diberi pendampingan dan dukungan permodalan untuk meningkatkan produktivitas. Industri rumah tangga diberdayakan secara kesinambungan mulai dari aspek pasar dan mutu produknya. Standardisasi mutu disosialisasikan pada semua industri untuk diterapkan sehingga peluang pasar dapat terbuka. *Ketiga*, usaha ditingkatkan baik pada internal usaha maupun dengan membantu kelompok usaha bersama.

Kedua, pelatihan terhadap penganggur berpendidikan perlu diintensifkan untuk meningkatkan daya saing daerah mengelola sumberdaya di wilayahnya. Banyak lulusan-lulusan SMK dan Diploma III yang masih menganggur meskipun mereka memiliki dasar keterampilan yang memadai. Pengangguran ini dapat dipoles dengan menarik mereka ke dalam Balai Latihan Kerja (BLK) agar keterampilan mereka sebagai potensi untuk membuka usaha dapat di-ekonomikan. Pemberdayaan melalui penumbuhan wirausaha baru di berbagai pelosok desa akan mengurangi beban perkotaan yang kian sarat dengan arus urbanisasi. Potensi ekonomi pedesaan dapat dijadikan wadah menahan tenaga kerja produktif untuk menjadi penganggur dan bahkan penjahat di perkotaan. Hanya dengan membantu mesin kerupuk bakar dengan bahan baku beras dan ubi kayu sebuah usaha produktif pedesaan dapat ditumbuhkan.

EDYANUS HERMAN HALIM



Keempat, peningkatan kemampuan pemasaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen secara berkelanjutan. Pasar dan konsumen memiliki karakteristik tersendiri dan perlu diidentifikasi agar ditemukan bauran-bauran pemasaran yang sesuai dengan target pasar sasaran dimaksud. Walaupun tidak langsung memperlihatkan hasil yang nyata pelatihan-pelatihan tentang pemasaran oleh pemerintah pada masyarakat pengelola usaha perlu terus dilakukan. Mengubah mindset pebisnis Indonesia dari berfikir sekedar membuat produk lalu menjualnya kepada berfikir mencari kebutuhan dan keinginan konsumen untuk membuat produk yang sesuai untuk mengisi kebutuhan dan keinginan tersebut sangat penting bagi penguatan ekonomi masyarakat. Memutar balik cara berfikir tersebut memang perlu kerja keras dan kesabaran.

Kelima, pemerintah juga perlu secara tegas menjaga dinamika ekonomi tidak mengarah pada hegemoni usaha dan praktek-praktek bisnis yang curang. Bisnis yang tidak bertanggung jawab justru akan merugikan masyarakat dan merusak patahan perekonomian itu sendiri. Untuk pertumbuhan ekonomi pemerintah memang perlu mendorong investasi. Namun, khususnya di Riau, investasi yang diperlukan adalah investasi yang mendorong perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu sektor-sektor tradable menjadi kunci utama pemerataan ekonomi yang memiliki basis yang kuat. Sektor pertanian dan industri hilirnya merupakan potensi yang sangat besar untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dan membentenginya dari krisis ekonomi dunia.

Besarnya peranan pemerintah dalam mendorong



perbaikan ekonomi riil di daerah perlu disikapi melalui kebijakan yang komprehensif dan saling terkait. Ego sektoral dan ego daerah tidak akan mampu meletakkan pondasi ekonomi masyarakat yang kokoh dan tahan uji. Besarnya APBD satu kabupaten tidak bernilai strategis bila penggunaan atau investasi di wilayah itu tidak mampu membuka kesejahteraan masyarakat dalam arti cara berfikir, aksesibilitas, kemauan untuk maju, integritas dan kewirausahaan. Pemerintah harus memutus belenggu itu melalui program-program yang terencana baik dan tepat sasaran. Jangan sampai uang Bagi Hasil Migas yang begitu besar hanya singgah sementara saja di Riau untuk kemudian menguap entah kemana. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dari anggarannya hendaknya selalu landasi kesadaran bahwa sumberdaya alam itu akan habis dan perlu diganti dengan sumberdaya manusia yang berkualitas.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Repository of Riau
Universitas Riau
https://repository.unri.ac.id

Hak cipta milik Universitas Riau

EDYANUS HERMAN HALIM



MEMBUKA JALAN INDUSTRI KREATIF

TAUTAN pertautnya penyelenggaraan acara yang berskala nasional di Pekanbaru memberi peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembeli. Pasar Bawah sebagai salah satu objek wisata belanja penuh sesak oleh pengunjung dari berbagai penjuru Indonesia. Pertemuan walikota se-Indonesia ternyata membawa pebelanja yang sangat potensial. Ibu-ibu pejabat berseliwiran dengan berbagai tentengan. Memborong sepatu, parfum, ikat pinggang, dompet dan bahkan samapi jam tangan bermerek dengan harga yang lumayan mahal.

Sayangnya produk-produk tersebut bukanlah buatan Pekanbaru atau Riau. Semuanya produk impor, baik dari Malaysia, Singapore atau dibuat di Jawa dan Bukittinggi. Soal keaslian produk dan kemasan sesuai merek yang tertera, itu urusan nanti. Sepanjang tidak ada penertiban urusan Hak Kekayaan Intelektual belum mendatangkan masalah yang



berarti. Pertanyaannya; kapan produk karya anak jati Riau dengan ciri khas dan popularitas yang memadai dapat menandingi kumpulan produk impor tersebut?

Riau memang masih langka produk kreatif yang mampu dijadikan icon bagi pelancong. Sulit mencari barang kerajinan dan makanan yang benar-benar *marketable* dan memiliki daya tarik pasar yang baik. Perkembangan industri ini memang sangat menyedihkan. Nilai tambah yang dihasilkan sangat minim. Data terakhir dalam Riau Dalam Angka tahun 2008 mencantumkan nilai tambah pasar industri Riau tahun 2005 sebesar Rp 18,393 triliun. Ini berarti kontribusinya hanya 23,20 persen.

Sementara itu, industri kreatif masih sangat tertinggal. Perannya dalam struktur industri Riau hanya sekitar 0,31 persen. Jika dilihat kontribusinya dalam PDRB makin tak memiliki pesan. Artinya, Riau belum dapat menumbuhkan industri kreatif yang mampu menjadi andalan masa depan. Industri kreatif yang cukup berkembang di Riau adalah di bidang penerbitan, percetakan dan reproduksi. Hal ini sejalan dengan implementasi otonomi daerah yang memberi peluang bagi usaha percetakan dan penerbitan di daerah. Sedangkan industri furniture dan barang olahannya kontribusinya sangat kecil, yakni hanya sebesar 0,11 persen.

Sebenarnya terdapat 14 macam industri kreatif yang dapat dikembangkan. Prospeknya di masa yang akan datang cukup cerah. Peran Industri Kreatif di Indonesia menurut Mari Elka Pangestu (*Kompas*, 25 Juni 2009) makin signifikan. Industri kreatif telah menyumbang 6,3 persen dari PDB Indonesia, menyerap 5,4 persen tenaga kerja dan berkontribusi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



sebesar 9 persen dalam total ekspor nasional. Bidang-bidang industri kreatif yang kian berkembang antara lain; periklanan, penerbitan dan percetakan, TV dan radio, film, video dan fotografi, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, kesenian, kerajinan, pasar barang seni, permainan interaktif, layanan komputer dan piranti lunak. Termasuk pula penelitian dan pengembangan. Bidang-bidang tersebut akan menjadi andalan untuk menggapai keunggulan bangsa di masa yang akan datang.

Bagi Riau, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan bernilai nasional yang ditaja. Bahkan pada tahun 2012 akan menjadi tuan rumah PON XVIII membangun kemajuan industri kreatif menjadi tantangan yang tak terelakkan. Upaya menaikkan kesejahteraan rakyat hanya mungkin diperoleh dengan meningkatkan peran dan partisipasi rakyat dalam berbagai acara-acara dimaksud. Besarnya peran rakyat hanya mungkin diperoleh bila mereka mampu dan makin kreatif melorotkan produk-produk kreatif pula. Icon Riau sebaiknya tidak didasarkan pada kemampuan Riau sebagai penyumbang pendapatan nasional melalui Minyak Bumi, Hasil Hutan dan Kelapa Sawit. Riau hendaknya memiliki keragaman produk kreatif yang mampu merambah berbagai pasar, baik dalam bentuk nyata atau produk jasa yang menyenangkan.

Berbagai langkah kiranya perlu digagas untuk itu. Pertama, Riau harus menyusun *blue-print* pengembangan industri kreatif untuk 20 tahun ke depan sebagai *road map* semua stakeholder memajukan industri kreatif di Riau. Penganggaran akan mudah dilakukan bila ada *platform* pengembangan industri kreatif Riau yang holistik dan akurat. *Blue-*



print ini haruslah disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan menyerap aspirasi mereka secara tepat di hadapan tantangan pasar dan persaingan yang kian ketat.

Kedua, mengoptimalkan peran BLK sebagai basis peningkatan ketrampilan masyarakat dalam mengelola dan memajukan industri kreatif. Format pengelolaan dan pengembangan BLK harus diubah suai dari sekedar tempat pelatihan bengkel mobil dan reparasi TV menjadi pusat peningkatan kreatifitas masyarakat untuk melahirkan produk-produk kreatif yang marketable.

Ketiga, dukungan pemasaran melalui peningkatan pemasaran dalam arti luas dan jaringan melalui interaksi dan komunikasi intensif dengan konsumen maupun calon konsumen. Promosi yang tepat sasaran menjadi penting diperhatikan sehingga arti investasi dalam kegiatan promosi tersebut menjadi optimal. Keadaan ini akan memunculkan konsistensi dalam produksi, baik dari aspek mutu dan keberlanjutannya.

Keempat, dukungan pembiayaan dari pihak perbankan maupun institusi keuangan non-bank lainnya. Pemerintah harus mendorong iklim perkreditan yang produktif untuk industri ini. Termasuk kredit-kredit dalam upaya menjangkau pasar yang lebih profitable dan efisien.

Kelima, membangun infrastruktur yang memadai bagi tersedianya ruang publik yang mampu mendorong masyarakat untuk menunjukkan kreatifitasnya. Industri kreatif tidak akan mampu tumbuh bila saluran-saluran kreatifitas masyarakat tersumbat, baik itu oleh politik maupun budaya yang sudah usang.

EDYANUS HERMAN HALIM



Keenam, menjamin kenyamanan berkreasi melalui adanya perundang-undangan yang adil bagi insan-insan kreatif Riau untuk menelorkan produk-produk baru secara berkesinambungan tanpa takut pada ancaman-ancaman pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Lalulintas dan aturan main industri kreatif juga harus diciptakan sedemikian rupa agar produk-produk kreatif yang dihasilkan tidak keluar dari koridor norma dan budaya Melayu.

Ketujuh, menciptakan media dan organisasi yang mampu merangsang insan kreatif Riau melakukan kegiatan-kegiatan yang optimal sehingga berbagai produk kreatif dapat dikembangkan secara berkesinambungan. Pasar juga dapat digayet melalui kelompok-kelompok kerja kreatif dan bengkel-bengkel produksi. Desain dan arsitektur, baik sebagai bagian dari industri ini sendiri maupun sebagai pendukung industri kreatif lainnya mendorong memberikan kontribusi lebih nyata bagi tumbuhnya icon Riau yang kian kreatif dan *marketable*.***

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.



20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengkan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

MEMAKNAI MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI

PEREKONOMIAN Riau pada akhir 2009 mulai menunjukkan trend yang membaik. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia Pekanbaru, pada triwulan keempat tahun 2009 tumbuh sebesar 7,25 persen. Lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 5,57 persen. Beberapa faktor yang mendorong geliat ekonomi Riau adalah membaiknya ekspor. Triwulan ketiga 2009 ekspor masih tumbuh negatif (-1,76 persen) sedangkan pada Triwulan IV sudah positif pada level 5,49 persen. Laju pertumbuhan ekspor antar negara mencapai 4,95 persen dan ekspor antar daerah mencapai 9,67 persen. Pangsa ekspor bersih dalam struktur PDRB Riau adalah 11,76 persen.

Walaupun kinerja ekspor membaik namun ternyata belum mampu mendorong konsumsi masyarakat. Komoditas ekspor utama Riau adalah minyak dan lemak nabati serta

EDYANUS HERMAN HALIM



bertas dan bubur kertas. Kedua produk andalan ekspor ini sangat terkait dengan sebahagian besar mata pencaharian penduduk Riau. Lemak dan minyak nabati merupakan produk turunan kelapa sawit. Sekitar 323.000 kepala keluarga di Riau menggantungkan kehidupannya dari kebun kelapa sawit. Luas kebun kelapa sawit di Riau diperkirakan sudah mencapai 2,6 juta hektar. Bila ekspor CPO atau lemak dan minyak nabati ini sudah membaik berarti permintaan akan produk tersebut di luar negeri kian pulih dan harga bergerak naik. Sehingga pendapatan masyarakat mulai pula membaik dan konsumsi dengan sendirinya akan mengalami peningkatan pula.

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi tanpa mengas di Riau untuk triwulan keempat tahun 2009 ternyata pertumbuhan konsumsi masyarakat masih melambat dari 10,49 persen pada Triwulan III 2009 menjadi hanya 8,38 pada triwulan keempat. Keadaan ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan kinerja ekspor belum memberi dampak yang signifikan bagi perbaikan konsumsi rumah tangga petani Riau. Padahal pangsa konsumsi rumah tangga dalam struktur perekonomian Riau mencapai 50,56 persen. Artinya, perekonomian Riau lebih separohnya bergantung pada kinerja konsumsi rumah tangga sehingga bila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi peran konsumsi masyarakat masih sangat dominan. Namun keadaan ini bukan menunjukkan kualitas perekonomian yang baik pada satu sisi namun pada sisi yang lain merupakan benteng perekonomian daerah karena konsumsi domestik dapat menahan guncangan perekonomian yang bersumber dari konjunktur perekonomian global.



Konsumsi swasta juga mengalami perlambatan yang sangat signifikan. Bila pada Triwulan III 2009 sektor ini mampu tumbuh sebesar 19,35 persen maka triwulan keempat hanya tumbuh sebesar 8,01 persen. Keadaan ini memang bermacam-macam sudah merupakan suatu siklus akibat banyaknya pengusaha di Riau yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah. Biasanya pada Triwulan IV para pemborong gagal mencairkan termin pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya sudah dikerjakan. Kebutuhan akan barang-barang pembangunan jadi berkurang. Selain itu terkendalanya berbagai program pembangunan daerah akibat dan yang tidak cair dari pemerintah pusat memicu rendahnya konsumsi swasta.

Ke depan, guna memperbaiki kualitas perekonomian Riau yang dari aspek pertumbuhan sudah menunjukkan gejala yang kurang membaik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya perlu dilakukan kebijakan strategis daerah yang mendorong kearah itu. *Pertama*, besarnya dan bagi hasil yang diterima hendaknya semakin difokuskan pada perbaikan infrastruktur yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa. Tanpa itu perekonomian rakyat tidak akan terdongkrak membaik. Masalah transportasi dan penyediaan listrik sangatlah vital. Sementara itu kegiatan yang mengarah pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksklusif sebaiknya diubah suai pada pola yang lebih memiliki keterkaitan ekonomi kebelakang (*backward-linkage*) dan kedepan (*forward-linkage*).

Kedua, membangun jaringan ekonomi beketerkaitan antar pelaku dan antar wilayah sangat mempengaruhi kualitas dan ketahanan ekonomi Riau. Tanpa itu, nilai tambah

EDYANUS HERMAN HALIM



hanya akan banyak dinikmati pengusaha disektor hilir dan ciri perkeonomian agraris Riau dengan dominasi perkebunan sulit diharapkan mendongkrak kesejahteraan petani. Konsumsi rumah tangga akan bergerak lambat mendorong kinerja pertumbuhan karena pendapatan masyarakat tak mencapai tingkat keekonomian yang memadai. Menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan, baik sawit, karet maupun kelapa pada tingkat harga ekonomis bagi petani akan menaikkan nilai tukar mereka dan memicu tumbuhnya konsumsi.

Ketiga, dalam jangka menengah Riau perlu semakin mengedepankan kinerja kewirausahaan masyarakat sehingga posisi strategis Riau pada pintu gerbang perdagangan antar bangsa dan antar daerah bisa dimanfaatkan. Riau harus menjadi pusat industri yang dapat menyuplai barang kebutuhan pokok dalam negeri dan berorientasi ekspor. Pemerintah daerah harus mendorong tumbuhnya usahawan-usahawan daerah yang handal. Produk-produk *tradeable* harus muncul di Riau baik dalam bentuk barang makanan maupun barang belanja lainnya. Riau memiliki potensi yang cukup besar untuk itu. Termasuk industri turunan dari CPO dalam kerangka menjamin tersedianya produk konsumsi dalam negeri.

Keempat, pengembangan industri kreatif untuk menghadapi berbagai moment penyelenggaraan kegiatan yang terpusat pelaksanaannya di Pekanbaru. Menghadapi PON XVIII tahun 2012 memerlukan pencerahan tersendiri untuk meningkatkan industri kreatif. Termasuk penyelenggaraan berbagai seminar dan workshop tingkat nasional dan internasional.



Terakhir, memacu kinerja perusahaan daerah agar lebih berkontribusi pada perbaikan perekonomian rakyat. Perusahaan daerah yang bergerak disektor keuangan diharapkan mampu mem-backup kebutuhan permodalan usaha rakyat. Perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor strategis diharapkan berperan dalam menopang proses usaha yang lebih efisien. Termasuk peran PT. Riau Airline dalam menopang distribusi orang dan barang serta mendorong laju investasi masuk ke wilayah ini.

Pada dasarnya bagi Riau untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi, baik dunia maupun Indonesia dan Riau itu sendiri perlu ada kebijakan yang lebih holistik dan memihak rakyat. Keberpihakan itu tidak ditunjukkan dengan program-program hibah yang bersifat memanjakan (carity) tetapi program produktif dan berskala ekonomi lebih luas, berkelanjutan dan kontinyu. Termasuk membangun budaya bersih dalam birokrasi sebagai instansi pelayan masyarakat, bukannya penikmat kesejahteraan masyarakat secara tidak sah dan dilarang.***



21.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEREKONOMIAN Riau sejak tahun 2006 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan rerata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas sebesar 8,66 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 6,09 persen. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Riau turun menjadi 8,25 persen dan tahun 2008 juga melemah menjadi 8,06 persen. Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Riau kian rendah yang hanya mampu tumbuh sebesar 6,44 persen, namun masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mampu tumbuh 4,4 persen. Memasuki Triwulan I 2010 pertumbuhan ekonomi Riau kembali melemah pada tingkat 5,93 persen sedangkan pada Triwulan II terjadi *recovery* dimana tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,68 persen. Bahkan pada



Triwulan III naik lagi menjadi 6,85 persen. Keadaan ini menunjukkan adanya periode pemulihan perekonomian setelah selama 5 tahun tingkat pertumbuhannya senantiasa mengalami penurunan.

Melegainya kembali pertumbuhan ekonomi Riau diindikasikan oleh normalnya kembali harga kelapa sawit di pasaran. Meskipun terjadi fluktuasi harga namun amplitudonya tidak tinggi. Kejatuhan harga sawit tidak sampai terlalu merugikan petani yang dapat menyebabkan anjloknya daya beli masyarakat. Akibat masih tingginya konsumsi masyarakat sektor-sektor sekunder dan tersier ikut terkontrol. Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah pada sektor pembentukan modal tetap bruto yang mencapai 12,22 persen dan pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan laju pertumbuhan mencapai 8,15 persen serta pengeluaran konsumsi pemerintah 7,11 persen. Sedangkan sektor ikutannya menggeliat cukup signifikan. BPS Pekanbaru menyitir pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas pada Triwulan III 2010 sebesar 6,58 persen, tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi 11,22 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Riau tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 1,89 persen.

Persoalan perekonomian Riau dengan sendirinya tidak terletak pada pertumbuhan karena dinamika perekonomian menunjukkan gairah yang senantiasa tinggi. Perekonomian dari aspek kualitas terutama dipandang dari indikator pemerataan dan kemampuan pertumbuhan menciptakan lapangan kerja sehingga mampu menyerap angkatan kerja yang tumbuh sangat tinggi di Riau merupakan aspek yang selama



ini masih memerlukan kebijakan dan penanganan yang serius dan urgen. Ketimpangan ekonomi Riau masih sangat tinggi. Di sektor pertanian sekalipun, khususnya perkebunan masih terjadi ketimpangan. Dari 2,06 juta hektar kebun sawit, 49 persen adalah milik perusahaan-perusahaan perkebunan. Jumlah perusahaan tersebut hanya sekitar 40 buah. Masyarakat hanya memiliki sekitar 51 persen dengan total kepala keluarga yang terbabit mencapai 378.500 kepala keluarga. Artinya setiap kepala keluarga hanya memiliki sekitar 2,8 hektar kebun. Sedangkan rerata per perusahaan dapat mencapai angka 25.235 hektar. Perbandingannya sekitar 1 banding 9013. Suatu ketimpangan komposisi kepemilikan yang sangat ironis.

Tingkat pengangguran terbuka di Riau mencapai 7,21 persen. Pertambahan angkatan kerja mencapai 1,87 persen dan pertambahan kesempatan kerja 3,83 persen. Relatif tingginya angka pengangguran di Riau masih dipertajam oleh keadaan pengangguran tak kentara. Sebahagian besar pekerja di sektor pertanian mengaplikasikan waktu kerja yang relative singkat dan banyak waktu yang terbuang percuma. Keadaan ini menyebabkan produktivitas masyarakat masih rendah. Namun, sebenarnya memberikan peluang untuk mengembangkan produktivitas di luar sektor pertanian. Industri rumah tangga dapat berkembang baik bila pemberdayaan dan penyuluhan kepada masyarakat dapat dioptimalkan. Terutama untuk industri berbasis masyarakat, seperti industri makanan ringan, kerajinan dan konveksi. Sentra-sentra industri berbasis rakyat harus dikembangkan untuk menampung ledakan penduduk yang bersumber dari migrasi.



Sasaran program pembangunan hendaknya diarahkan pada hal-hal yang masih menjadi kendala dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. *Pertama*, pembangunan infrastruktur yang mampu menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kumpulan komunitas rakyat. Kawasan ekonomi yang dinamis harus tersambung dengan berbagai pusat komunitas sehingga likuiditas ekonomi akan mengalir dalam skala yang lebih luas dan membabitkan banyak orang.

Kedua, mendorong investasi sektor riil yang difokuskan pada industri berbasis masyarakat dan industri hilir komoditas unggulan daerah. Baik berfungsi sebagai substitusi import maupun sebagai andalan ekspor. Termasuk mendorong terselenggaranya investasi replanting usaha-usaha perkebunan rakyat dan produk-produk yang dapat disinergikan dalam bentuk pertanian dan perkebunan terpadu.

Ketiga, angkatan kerja yang masih didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan rendah ditingkatkan *skill* dan keterampilannya melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan. Balai latihan kerja yang selama ini belum berfungsi dengan baik diberdayakan untuk mencetak tenaga-tenaga kelas menengah yang handal dan mampu bersaing.

Keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat akan kesehatan agar endemic penyakit menular dapat ditekan dan tidak mengganggu kinerja ekonomi masyarakat. Untuk itu peran program-program preventif dalam bidang kesehatan harus ditingkatkan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Gaya hidup yang lebih sehat ditingkatkan pemahamannya pada masyarakat untuk menghindari timbulnya penyebaran penyakit menular yang kian meluas.



Kelima, pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkesinambungan hendaknya dilakukan dengan sasaran kemandirian dan kinerja usaha rakyat yang kian optimal. Pendekatannya tidak melulu dari aspek teknis bisnis tetapi harus diiringi dengan kebijakan yang jelas tentang keberpihakan, kepastian usaha dan keadilan ekonomi memadai.

Kenam, kepemilikan asset tanah yang sangat timpang harus di benahi dengan kebijakan agrarian yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan pemerintah sebagai penyeimbang yang jujur dan adil. Tanpa kepemilikan tanah yang memadai rakyat tidak mungkin keluar dari cengkraman kemiskinan.

Ketujuh, mengembangkan kapasitas kelembagaan rakyat. Kelembagaan ekonomi di pedesaan untuk memperkuat akses rakyat terhadap modal dan perbaikan teknologi harus ditingkatkan kapasitasnya. Kualitas kelembagaan yang memadai akan membantu rakyat meningkatkan skala usaha ekonominya. Kelembagaan sosial diberdayakan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang makin produktif tanpa meninggalkan identitasnya sebagai bangsa Melayu yang santun dan bermartabat.

Melalui tujuh sasaran pelaksanaan pembangunan tersebut, maka momentum perbaikan ekonomi Riau yang terjadi saat ini akan kian bermakna bagi kesejahteraan rakyat. Jangan sampai justru yang tumbuh adalah liberalisasi ekonomi yang semakin memarjinalkan kekuatan ekonomi pasar rakyat. Hal ini perlu untuk menghindari disorientasi gaya hidup global yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa. Rakyat perlu jaringan komunikasi yang canggih dan lancar tetapi



perkembangan dunia internet harus dibarengi oleh pembinaan daya tahan mental masyarakat dan kecanggihan teknologi penapis infiltrasi gaya hidup yang serba menghalalkan segala yang menghancurkan martabat rakyat dan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di bawah pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository of University of Riau

<https://repository.unri.ac.id>



Hak cipta milik Universitas Riau

EDYANUS HERMAN HALIM



22.

MENGGUGAT MASYARAKAT ANTIMUTU

KOMITE Nasional Keselamatan Instalasi Listrik (Konsuil) dikritis secara tajam di Riau. Kehadirannya dinilai dapat menghambat ribuan tunggakan penyambungan listrik untuk konsumen. Disamping memunculkan tambahan birokrasi, konsumen juga dikenakan sejumlah biaya tertentu. Sistem seperti ini juga dianggap bakal menimbulkan persaingan tidak sehat antar konsumen, khususnya pengembang perumahan, dan menjadi media penyubur korupsi dan kolusi antara penerbit sertifikat SLO dengan pengembang yang ingin cepat mendapatkan sertifikasi.

Di Indonesia saat ini memang lagi marak yang namanya urusan sertifikasi. Mulai dari dosen sampai guru sekolah dasar harus mendapatkan sertifikasi untuk dapat dianggap layak menjadi seorang tenaga pendidik. Urusannya cukup berat, namun jika dikaitkan dengan kepentingan pembelajaran



Bagi anak didik sertifikasi mutu ini menjadi penting dan harus dipatuhi. Walaupun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan di sana sini, namun sertifikasi telah “mengejutkan” para pendidik bahwa ada persoalan kualitas yang harus dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan.

Indonesia memang dinilai kurang familier soal mutu. Mungkin karena penduduk yang demikian banyak, sedangkan penyediaan dan fasilitas pelayanan yang tak memadai persoalan mutu menjadi dikesampingkan. Termasuk upaya upaya memberikan mutu hidup yang baik bagi masyarakat justru malah ditentang oleh orang-orang yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan “anti mutu” tersebut. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta masyarakat petani tembakau, dan tentunya produsen rokok diduga juga ikut didalamnya, memprotes lahirnya undang-undang pelarangan merokok. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan anak bangsa akibat secara luasnya masyarakat mengkonsumsi rokok. Masyarakat miskin bahkan mau mengorbankan masa depan anaknya hanya karena sebungkus rokok yang harus dikonsumsi setiap hari. Pemberlakuan undang-undang ini tentunya sangat urgen dan tidak hanya memperhatikan kerugian petani tembakau dan produsen rokok.

Lemahnya perhatian terhadap mutu kehidupan dalam banyak contoh dapat diamati di Indonesia. Generasi muda kita dihadapkan pada lingkungan yang sangat jorok. Mesjid saja banyak yang tidak memiliki toilet yang memenuhi standar kesehatan. Apalagi di tempat-tempat keramaian, seperti pasar dan terminal. Bahkan di sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi kamar kecilnya tak dapat dipertanggung-

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.



jawabkan bila dikaitkan dengan mutu pelayanan yang seharusnya diberikan pada anak bangsa.

Sampai pada persoalan perut aspek mutu tetap tak menjadi perhatian. Kantin sekolah tidak jarang menjual makanan yang tidak memenuhi standar baku mutu yang layak. Makanan yang dijual tidak memiliki sertifikasi sehat yang dapat dipertanggungjawabkan. Suasana kantin sekolah, kantin dan dimanapun warung makanan tak satupun yang dapat dipertanggungjawabkan mutunya.

Ini kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang senantiasa dihadapkan pada dilema kebutuhan dan kualitas. Masyarakat Indonesia harus memiliki sesuatu untuk dikonsumsi tapi bila dihadapkan pada kualitas maka diperlukan upaya yang keras untuk mendapatkannya. Kualitas menjadi sesuatu yang terabaikan atau sengaja diabaikan demi kebutuhan. Penyakit merebak, rumah terbakar dan manusia menjadi seorang sumberdaya berilmu tanggung adalah bom waktu yang entah kapan akan meledak.

Masyarakat anti mutu yang menggejala saat ini sebenarnya muncul dari seringnya pengelola negara menjadikan lembaga-lembaga persyaratan tersebut sebagai ajang korupsi dan kolusi. Masyarakat menempuh jalan pintas karena ingin memperoleh sesuatu. Bertaburanlah sertifikat asli tapi palsu. Sertifikatnya ada tetapi substansinya tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam sertifikat tersebut. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) misalnya, seringkali ditemukan bahwa suatu perusahaan telah mengantongi sertifikat ini namun dalam prakteknya perusahaan tersebut justru mencemarkan lingkungan.



Haruskah masyarakat tanpa mutu ini tetap dipertahankan atau kapan pemerintah akan memiliki keberanian untuk menerapkannya secara konsisten dan tegas? Pertanyaan ini sulit dijawab bila pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk memaksanya. Selama ini masyarakat hanya mengetahui pemerintah hanya melakukan kecurangan-kecurangan birokrasi dan menghambat reformasi dan demokrasi yang tidak sehat. Pemerintah banyak tergantung pada suara rakyat. Tetapi itulah sesuatu yang tidak mungkin dicapai bila memang rakyat yang bermutu mau dikejar.

Pertama, sosialisasi yang intensif harus dilakukan untuk membentuk kesadaran masyarakat akan arti penting mutu dalam setiap sudut kehidupan. *Kedua*, melibatkan masyarakat dalam menyusun standar dan baku mutu yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. *Ketiga*, menentukan alat dan sumberdaya manusia yang bakal terlibat dengan cara-cara yang bermutu pula. Jangan sampai penentuan orang yang akan menjadi penilai mutu justru orang yang tidak memiliki integritas akan mutu itu sendiri. Dalam hal ini, kolusi dan korupsi dari proses pemutuan harus dicegah sedemikian rupa sehingga rakyat percaya akan institusi yang menangani mutu tersebut.

Keempat, setiap level pemerintahan seharusnya membentuk lembaga independen yang terdiri dari berbagai unsur yang akan bekerja melakukan penilaian terhadap mutu. *Kelima*, bagaimanapun pemerintah harus mengeluarkan biaya yang terkait dengan proses uji mutu dan institusi yang menanganinya. Jangan sampai proses meningkatkan mutu kehidupan masyarakat di berbagai sektor ini hanya sekedar menambah benang kusut birokrasi yang hasilnya justru

EDYANUS HERMAN HALIM



bertolak belakang dengan mutu itu sendiri. Mutu sangatlah penting agar bangsa dan anak bangsa mampu bertahan hidup di masa yang akan datang.***

Repository University of Riau

<https://repository.unri.ac.id>

© Hak cipta milik Universitas Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



ABSTRAKSI RPJP

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Universitas Riau.

3. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Universitas Riau.

ABSTRAKSA waktu yang lalu DPRD Provinsi Riau membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau yang diajukan pemerintah untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah. RPJP merupakan dokumen acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Lintas waktu yang melingkupinya lebih panjang. Dasar yang digunakan untuk melakukan ramalan-ramalan situasi masa depan harus dirumuskan secara lebih komprehensif dan akurat. Bila tidak, maka bias akan lebih besar dan sulit diterjemahkannya dalam kerangka perencanaan yang lebih pendek.

Dalam Rancangan RPJP Provinsi Riau 2005-2025 yang disampaikan ke DPRD ternyata masih sangat “kering” akan data yang akurat sehingga hasil prediksi masa depan dapat menjadi kabur dan bias makna. Keadaan umum dan kondisi daerah belum menggambarkan kondisi kekinian Riau, baik

EDYANUS HERMAN HALIM



Sebagai faktor pendorong keberhasilan pembangunan maupun sebagai masalah-masalah krusial yang perlu ditangani untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan. Termasuk berbagai tantangan yang mungkin timbul sebagai suatu horizon yang dinamis. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam hal gambaran tentang kependudukan, yakni pengangguran yang hanya digambarkan dari aspek jumlah (kuantitas) bukan dari aspek dinamika (kualitas). Masalah pengangguran tidak terlepas dari banyak variabel, seperti pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, kualitas administrasi kependudukan, migrasi, kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri yang harus dibuat oleh pemerintah daerah.

Puing-puing krisis global yang meninggalkan kendala demikian berat dalam proses pembangunan di Indonesia, termasuk Riau, dalam Rancangan RPJP sepertinya kurang disentuh secara substansial. Padahal pengaruh eksternal ini sangat signifikan mengganggu perekonomian sebahagian besar masyarakat. Inilah yang menunjukkan Rancangan RPJP Provinsi Riau 2005-20025 masih miskin akan kristalisasi masalah-masalah substansial yang dihadapi rakyat. Penurunan daya beli rakyat yang bekerja di sub-sektor kelapa sawit telah mengkoreksi level kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akibat krisis tahun 2007 lalu mencapai angka 35 persen. Dalam RPJP seharusnya masalah-masalah krusial seperti ini belum menjadi fokus perhatian yang memadai dan holistik. Pendekatan analisis situasi dalam RPJP sangat sederhana dan hanya terkesan sebagai uraian deskriptif yang kurang makna. Bila kondisi seperti ini dibiarkan maka rancangan perencanaan pembangunan hanya akan menjadi "sampah" belaka.



tanpa dapat dipedomani sebagai kerangka acuan utama dokumen perencanaan dibawahnya.

Dalam perspektif ekonomi, modal manusia di masa yang akan datang menjadi unsur utama yang akan menentukan keberhasilan pembangunan. Modal manusia pada umumnya diasosiasikan dengan pendidikan, kesehatan dan *entrepreneurship*-nya. Tiga komponen ini tak boleh saling lepas dan saling terkait haruslah prima untuk mendukung proses pembangunan yang optimal. Rancangan RPJP Provinsi Riau 2005-2015 nampaknya belum melihat masalah ini sebagai unsur penting. Modal manusia (*human capital*) masih tenggelam oleh ego-nafsu eksploitasi sumber daya alam sehingga strategi pengembangan sumberdaya manusia sangat tumpul.

Selain itu, sebelum ini telah begitu banyak aset daerah yang dibangun dengan dana ratusan milyar rupiah, seperti Terminal Agribisnis Dumai, Roro Dumai Melaka, BLK, SMK, Rice Processing Complex, dan Proyek-proyek multiyears lainnya. Fungsi dan peranannya dalam RPJP justru kurang disentuh sebagai variabel pendorong bagi kesuksesan pembangunan Riau ke depan. Mungkin karena itu dalam RPJP ini daya ungkitnya tidak tergambar dan utilitasnya tidak menjadi pemicu keberhasilan pembangunan.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi berbasis rakyat diperlukan campur tangan pemerintah yang memadai dan akuntabel. Namun demikian bila campur tangan ini tidak pas maka akan terjadi distorsi ekonomi yang justru sangat merugikan masyarakat. Selama ini berbagai Perda di kabupaten/kota dan provinsi telah menimbulkan dampak inefisiensi ekonomi yang tinggi. Adalah benar, tanpa campur

EDYANUS HERMAN HALIM



tangan pemerintah, kita juga mengamati para pemodal mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi secara tidak wajar dan berlebihan seperti PETI, HTI, dan Pembakaran Lahan untuk Perkebunan Sawit. Ekonomi modern ditandai dengan persaingan pasar yang dibarengi oleh campur tangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Walaupun sulit mencari sistem politik yang sesuai dengan keinginan mendapatkan pemerintahan yang transparan, bersih dan akuntabel, sesungguhnya dalam Rancangan RPJP Provinsi Riau 2005-2025 upaya-upaya ke arah *clean government and good governance* birokrasi pemerintah hendaknya lebih dipertegas. Dalam Rancangan RPJP yang diajukan ke DPRD nampaknya masih terkesan lalai menempatkan aspek itu sebagai bagian utama yang memadai.

Pendapatan per kapita yang hendak dicapai pada tahun 2025 dalam RPJP sebesar US\$ 9.000,00 sama dengan pendapatan perkapita negara Palau tahun 2008 yakni sebesar US\$ 9.100,00 dan sedikit lebih tinggi dari Income per Capita Brazil saat ini sebesar US\$ 8.400,00 atau Malaysia sebesar US\$ 7.221,00. Berdasarkan data World Bank Income per Capita rata-rata dunia tahun 2008 adalah sebesar US\$ 8.983,00. Jadi, bila Riau merancang pendapatan perkapita pada tahun 2025 yang akan datang hanya sebesar US\$ 9.000,00 tentu akan sangat tertinggal. Ini berarti target yang sangat pesimis padahal anjakan proses pembangunannya dan anggaran yang dimiliki sangat progresif. Pendapatan per kapita Indonesia saat ini memang hanya US\$ 2.254,00, tetapi jika Riau ingin terpacu hendaknya tidak mengacu pada itu karena aspek destruktif yang mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia sangat kental dan marak dengan budaya KKN.



Hal yang cukup fatal dalam rancangan RPJP Riau 2005-2025 adalah adanya keinginan mendorong terciptanya asimilasi kultural. Konteks ini hendaknya dapat diperjelas arah dan sasaran akhirnya agar tidak salah kaprah sehingga dapat melemahkan eksistensi dan kelestarian Budaya Melayu sebagai budaya yang harus terpelihara sesuai Visi Riau 2020. Kata pepatah *"dimana tanah dipijak disitu langit dijunjung"* hendaknya menjadi prinsip utama yang harus dipegang dalam melakukan asimilasi kultural. Heterogenitas dan pluralitas penting dipelihara dalam kerangka kebersamaan sepanjang waktu tersebut tidak menimbulkan infiltrasi yang melemahkan budaya tempatan atau tidak menimbulkan munculnya budaya-budaya baru yang justru sangat tidak berkesesuaian dengan warah Budaya Melayu itu sendiri.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



STRATEGI DIVERSIFIKASI EKSPOR

Strategis Riau dalam lalu-lintas perdagangan internasional memberi peluang untuk memacu kesejahteraan rakyat melalui ekspor. Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional memiliki potensi transaksi ekonomi mencapai 8 juta dolar Amerika per hari. Jalur ini menjadi muara atau pintu gerbang bagi pasar berbagai komoditas yang dihasilkan di Riau. Namun di sisi lain Riau dengan sendirinya juga rawan oleh masuknya produk-produk asing dan lebih terbiasa mengkonsumsi barang-barang impor ketimbang produksi dalam negeri.

Sampai Triwulan III 2010 pertumbuhan ekspor Riau, berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia Pekanbaru, mencapai 3,79 persen dan impor meningkat sebesar 14,09 persen. Ini berarti pada periode ini terjadi kontraksi net ekspor Riau sebesar 6,20 persen. Ekspor non-migas meng-



alami pertumbuhan sebesar 3,46 persen sedangkan impor mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya dari 6,09 persen pada Triwulan II menjadi 5,63 persen. Net ekspor komoditas non-migas Riau tumbuh 12,36 persen dan lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 21,42 persen. Volume ekspor non-migas Riau triwulan ketiga 2010 mencapai 222 juta ton dengan nilai sebesar US\$ 5.781 juta. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 dari volume ekspor Riau meningkat 5,13 persen dan dari nilainya naik 25,55 persen. Sementara volume impor naik 65 persen dari 1,009 juta ton menjadi 1,763 juta ton. Nilainya justru mengecil dari US\$ 1.281 menjadi US\$ 836 juta atau turun 34,77 persen. Data ini menggambarkan dari aspek volume net ekspor Riau turun 3,20 persen dan dari aspek nilai meningkat sebesar 48,81 persen.

Persolan neraca perdagangan luar negeri Riau tidak hanya berkenaan dengan net ekspor semata. Didalami dari aspek komoditas pangsa ekspor non-migas didominasi oleh kelompok minyak dan lemak nabati. Meningkatnya ekspor minyak dan lemak nabati yang terutama berasal dari CPO memberi pengaruh yang sangat signifikan pada perkembangan ekspor Riau. Nilai ekspor kelompok minyak dan lemak nabati sebesar US\$ 1.324 juta atau mencapai pangsa 70,81 persen. Dengan sendirinya bila terjadi gejolak permintaan terhadap CPO dan fluktuasi harganya di pasaran internasional meningkat, maka resonansinya terhadap nilai ekspor Riau akan sangat terasa. Kelompok barang lain yang memberi peran besar terhadap ekspor Riau adalah barang manufaktur dengan pangsa mencapai 10,43 persen.

EDYANUS HERMAN HALIM



Konsentrasi ekspor Riau tidak hanya dapat dilihat dari aspek jenis komoditas. Sasaran pasar atau negara tujuan ekspor juga menjadi terkonsentrasi sebagai akibat produk yang diekspor juga terkonsentrasi pada kelompok barang minyak dan lemak nabati. Dalam aspek volume 67,55 persen ekspor Riau tertuju pada negara-negara Asia seperti China, India dan Malaysia. Sedangkan 24,67 persen lagi ke negara-negara Eropa, seperti Belanda dan Italia. Demikian juga dalam hal nilai ekspor dimana 64,57 persen diperoleh dari ekspor ke negara-negara Asia dan 25,36 persen bersumber dari negara-negara Eropa. Semua negara-negara tersebut merupakan pasar utama CPO Riau.

Potensi ekonomi Riau banyak bertumpu pada kelapa sawit. Dari sisi ekspor ketergantungan Riau pada pasar CPO sangat besar. Di sisi lain dorongan konsumsi masyarakat yang mendominasi pertumbuhan ekonomi Riau dari aspek penggunaan juga bertumpu pada konsumsi masyarakat perkebunan. Jumlah petani sawit Riau saat ini mencapai 378.500 kepala keluarga yang terdiri dari 274.500 KK petani non-plasma dan 104.000 KK petani plasma. Bila konsumsi rumah tangga per kepala keluarga petani per bulan mencapai Rp 3 juta, maka potensi konsumsinya secara keseluruhan mencapai Rp 1,136 triliun per bulannya. Oleh karena itu, gejolak harga sawit yang dipicu oleh fluktuasi harga CPO di pasaran internasional akan sangat signifikan mempengaruhi perekonomian masyarakat Riau. Ketergantungan pada negara tujuan ekspor tertentu dengan sendirinya akan menyebabkan ketergantungan masyarakat pada satu jalur dinamika perekonomian menjadi besar.

Pengalaman pahit perekonomian Riau akibat ketergantungan perekonomian masyarakatnya pada hasil perkebunan



Perseority Universitas Riau
http://ejournal.unri.ac.id
Pernah dialami ketika terjadi penurunan harga CPO dan TBS tahun 2008 yang lalu. Bila sebelumnya rerata harga TBS mencapai Rp 1.300,- maka akibat turunnya permintaan terhadap CPO di berbagai negara tujuan ekspor Riau mengakibatkan turunnya harga TBS menjadi sekitar Rp 300,- per kilogramnya. Pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat secara umum sangat signifikan. Setiap kepala keluarga berpendapatannya mencapai Rp 30,25 juta. Ini berarti seluruh petani sawit Riau terjadi penurunan daya beli dan kesempatan konsumsi mencapai Rp 11,5 triliun perbulannya.

Persoalan ketergantungan seperti digambarkan di atas harus segera dipecahkan dan penanganannya diimplementasikan secara komprehensif. *Pertama*, kebijakan pertanian hanya berorientasi pada upaya-upaya meningkatkan produksi, apalagi dengan sistem monokultur tanaman. Lebih penting dilakukan adalah menata sistem dan pengelolaan pertanian yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu, pemberdayaan kelompok-kelompok tani untuk diversifikasi produk pada lahan yang dimilikinya menjadi penting dan mendesak. Sistem pertanian terintegrasi dalam perkebunan sawit untuk diversifikasi pendapatan atau paling tidak untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga dari hasil pendapatan mata pencaharian inti hendaknya mulai digagas dan diimplementasikan.

Kedua, meningkatkan peran tenaga pendamping pedesaan yang mampu memotivasi masyarakat menghasilkan produk-produk unggulan ekspor, khususnya industri rumah tangga. Upaya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam hal standarisasi pasar dalam aspek kualitas, daya tahan

EDYANUS HERMAN HALIM



produk, dan jaminan kesehatan konsumennya dilakukan secara berkesinambungan melalui pendamping masyarakat desa dan memobilisasi tenaga penyuluh lapangan.

Ketiga, diversifikasi komoditas unggulan ekspor akan memudahkan upaya-upaya lanjutan berkenaan dengan diversifikasi negara tujuan ekspor. Peluang pasar negara-negara Afrika dan Amerika serta Eropa dapat tangkap bila Riau memiliki produk unggulan ekspor yang beragam. Sumbernya dapat memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia. Kebutuhan daging yang berkualitas dapat diproduksi dari sistem pengemangan peternakan yang terintegrasi dengan sawit. Pengemangan budidaya perikanan dan teknologi pengolahannya merupakan kebijakan alternative yang *profitable*.

Keempat, menumbuhkan investasi pada industri manufaktur produk-produk *tradable*, baik barang makanan dan minuman maupun barang-barang belanjaan lainnya (*shopping goods*). Produk-produk yang tidak mengolah bahan-bahan alam dapat saja diproduksi melalui kawasan-kawasan industri yang dirancang secara baik. Industri ini akan menciptakan lapangan kerja yang cukup besar untuk menampung ledakan penduduk angkatan kerja yang tercipta akibat migrasi yang besar ke Riau.

Saat ini keberlangsungan proses bisnis di Riau untuk mampu mencapai empat hal tersebut masih dihadapkan pada beberapa problema seperti kapasitas infrastruktur yang buruk, perlindungan sosial yang rendah, dan keberpihakan pada pengusaha yang tidak tegas. Oleh karenanya kunci agar para pengusaha dan masyarakat mampu menjadi mitra pemerintah dalam mencapai kekuatan ekonomi akan sangat



tergantung pada peningkatan dukungan infrastruktur, perlindungan, dan kepastian usaha diimplementasikan secara tegas melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas serta memihak pada kepentingan rakyat, dan menciptakan etika berusaha yang mampu menjamin terselenggaranya dinamika perkonomian yang efisien.***

Repository of Riau

<https://repository.unri.ac.id>

© Hak cipta milik Universitas Riau

Tidak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

EDYANUS HERMAN HALIM



15.

MENYIASATI "KISRUH" BANK RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

DI tengah gencarnya proses perubahan yang dijalankan oleh Bank Riau dan promosi untuk menempatkan *image* itu di benak konsumen (*positioning strategy*), nasabah dan banyak orang terperanjat oleh adanya mosi tak percaya yang disampaikan karyawan terhadap pimpinannya. Tak tanggung-tanggung, hampir semua kepala cabang dan divisi ikut menyokong mosi tersebut. Ini bukan sampel tetapi hampir semua anggota populasi terbabit dan menganggap gaya kepemimpinan sekarang membahayakan bank daerah ini. Tanggapan pun bermunculan. Baik yang pro maupun yang kontra. Namun, bagaimana menyiasatinya sehingga bank ini dapat tetap jadi icon keberhasilan BUMD di provinsi ini?

Dari aspek intermediasi sebagai fungsi utama bank menjembatani pemilik dana dengan pengguna dana, sejak dua tahun terakhir, memang telah terjadi perubahan yang signifikan. Kredit yang disalurkan tahun 2007 baru sebesar Rp 3,14 triliun



Oktober 2009 naik menjadi Rp 6,91 triliun. Artinya meningkat sebesar 120,1 persen atau rerata 60,03 persen per tahunnya. Ekspansi kredit ini sangat mencengangkan. Risiko yang melekat didalamnya berkorelasi positif dengan jumlah kredit yang digelontorkan.

Sumber pemberian kredit tentulah dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Pada tahun 2007 DPK mencapai Rp 10,49 triliun, sedangkan pada posisi Oktober 2009 turun menjadi Rp 9,1 triliun. Kondisi ini yang menandakan para pegawai yang bekerja di lapangan. Ekspansi kredit tidak diikuti oleh naiknya DPK sehingga bisa membahayakan kesehatan bank. Apalagi selama ini dana pihak ketiga banyak bergantung pada dana pemerintah daerah. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) kian membengkak dan dana-dana jangka pendek yang dilempar pada kredit jangka panjang bisa mengancam likuiditas bank tersebut. Disinyalir saat ini DPK Bank Riau tinggal Rp 6,95 triliun, sedangkan kredit sebesar Rp 6,65 triliun. Artinya LDR sudah mencapai 95,68 persen. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia bila LDR melewati angka 100 persen, maka bank yang bersangkutan langsung di bawah pengawasan Bank Indonesia sebagai bank terancam tidak likuid.

Kurangnya DPK bersumber dari lemahnya Bank Riau menggaet dana masyarakat di luar dana pemerintah. Terlalu bergantung pada dana pemerintah sangatlah berisiko karena penempatan dana pemerintah di Bank Riau dalam bentuk giro dan dikategorikan sebagai DPK jangka pendek. Dana jangka pendek sulit dilempar menjadi kredit di sektor riil karena kredit merupakan investasi jangka panjang. Akibatnya,

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dana tersebut hanya layak ditempatkan dalam investasi jangka pendek pula. Bila tidak maka ada kemungkinan asset atau harta kekayaan bank akan terkuras. Dalam mengelola dana bank aspek keseimbangan likuiditas aktiva lancar sangat penting diperhatikan. Bila gegabah melempar dana, maka risikonya adalah kekurangan likuiditas. Bank terancam masuk menjadi bank gagal.

Sampai Oktober 2009 ekspansi kredit Bank Riau memang diperoleh dari mengalihkan dana di SBI ke kredit di sektor riil. Pada satu sisi kebijakan ini baik karena akan mendorong bergeraknya ekonomi masyarakat. Namun bagi Bank Riau risikonya cukup besar karena dana jangka pendek tidak dapat ditempatkan diinvestasikan pada aktiva jangka panjang. Penukaran SBI Bank Riau sangat spektakuler. Pada tahun 2007 masih sebesar Rp 5,580 triliun, sedangkan pada Oktober 2009 tinggal 969,009 milyar. Dalam dua tahun terakhir beralih sampai 82,63 persen. Padahal komposisi DPK yang bersumber dari giro dan tabungan (dana jangka pendek) masih sebesar 83,36 persen. Ini jelas menimbulkan risiko likuiditas di masa yang akan datang bila bank tersebut tidak hati-hati mengelola dananya.

Bagi Bank Riau tanda-tanda itu mulai nampak. Bila tahun 2007 asset Bank Riau sekitar Rp 13 triliun dan dikategorikan sebagai bank menengah besar, maka saat ini assetnya tinggal Rp 9,8 triliun dan dikategorikan sebagai bank kecil. Posisi Bank Riau sudah di bawah Bank Aceh yang beberapa waktu yang lalu dilanda tsunami. Data ini menandakan bahwa gembar-gembor Bank Riau belum menuai buah tetapi malah menanggung masalah. Karyawan menjadi resah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan penyalinan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



arena mereka memahami bahwa bank dalam keadaan “menantang kritis”.

Eksistensi yang digelontorkan Bank Riau perlu dicermati oleh Bank Indonesia selaku pengawas dan harus lebih fokus. Bila bank ini gagal risikonya sangat besar ke daerah. Bank Indonesia tidak boleh lengah dengan berbagai promosi yang ditawarkan. BI harus melihat apakah pembukaan kantor-kantor tersebut memang efisien dan layak. Rencana Bank Riau akan membuka kantor sebanyak 40 buah di tahun 2008 ternyata hanya terealisasi sebanyak 20 buah saja. Sedangkan rencana pembukaan 25 kantor tahun 2009 belum teresana satu kantor pun. Pembukaan kantor tahun 2009 hanyalah kelanjutan dari rencana tahun 2008. Bank Indonesia diharapkan menelaah ini terutama sekali bila dikaitkan dengan ketersediaan *Information Teknologi (IT)* yang dimiliki Bank Riau. Bila IT tak mendukung, maka sangat sulit merekrut kantor-kantor.

Pembukaan kantor juga harus memperhatikan aspek kemampuan mendapatkan DPK di wilayah dimana kantor dibuka. Orientasinya jangan hanya melempar kredit. Bank Riau dengan ambisi melebarkan sayap sepertinya telah menanamkan uang untuk sewa kantor yang dicadangkan dan merekrut pegawai tetapi kantornya belum dapat dibuka sebagaimana direncanakan. Sewa dan gaji pegawai menjadi mubazir dan pegawai kian membengkak. Kantor yang dibuka tidak mampu mendongkrak perolehan DPK yang seharusnya menjadi tulang punggung operasional bank. Akibatnya LDR meroket dan berisiko bagi kesehatan bank sehingga bisa terancam sebagai bank dalam pengawasan Bank Indonesia.



Jangan sampai karena ekspansi yang tak terukur Bank Riau masuk menjadi bank gagal. Tingginya LDR telah menyebabkan awal tahun 2010, Bank Riau terkendala menyalurkan kredit untuk menjaga LDR tidak melebihi 100 persen.

Bagaimana menyiasati masalah ini? *Pertama*, ekspansi harus dilakukan dengan melihat kelayakan aspek internal dan eksternal. Orientasinya jangan hanya pada kredit semata, tetapi juga diperhatikan kemampuan menarik dana pihak ketiga sebagai sumber pemberian kredit. Fungsi intermediasi harus diarahkan pada dua sisi dimaksud. *Kedua*, teknologi harus disesuaikan dengan biaya yang dibebankan untuk itu. Bank Riau telah me-*launching phone-banking*, *SMS banking* dan bahkan bekerjasama dengan BCA untuk ATM Prima, tapi siapa yang diuntungkan dalam program ini ? BCA atau Bank Riau? Sejauhmana program ini telah meningkatkan kinerja Bank Riau ? Semuanya harus terukur dari aspek *cost and benefit* agar Bank tidak menanggung krisis.

Ketiga, BI harus lebih agresif mengingatkan Bank Riau terhadap kebijakan-kebijakan yang dapat membahayakan bank tersebut. Termasuk bila ditengarai adanya kebijakan-kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana disyaratkan peraturan BI. *Keempat*, penghimpunan dana pihak ketiga harus lebih terdiversifikasi. Jangan terlalu bergantung pada dana Pemda. Bank Riau harus mengembangkan produk-produk inovatif menggaet dana masyarakat, khususnya untuk deposito yang memiliki durasi panjang. Dana dengan durasi panjang akan menambah kekeluaan melemparnya dalam bentuk kredit.

Kelima, ekspansi hendaklah dilakukan sesuai dengan



kemampuan. “Jangan laut hendak diduga bila kail panjangnya sejengkal”. Pegawai dengan kemampuan yang belum memadai akan sulit menghadapi gebrakan yang berlebihan. Kebijakan seperti itu justru melahirkan resistensi yang tinggi dari armada di level bawah. Pengembangan pegawai dan peningkatan mutu perangkat teknologi menjadi urgen untuk masa yang akan datang.

Keenam, pendapatan juga harus didiversifikasi sehingga tidak hanya bergantung pada *spread* atau bunga kredit. Saat ini Bank Riau semakin menggantungkan pendapatannya dari bunga dan sakitnya perkembangannya tidak pula menggemakan. Tahun 2007 pendapatan bunga mencapai Rp 1,093 triliun sedangkan pada Oktober 2009 hanya Rp 1,042 triliun. Sebaliknya beban personalia telah kian menguras pendapatan. Tahun 2007 baru Rp 156,021 milyar, maka pada Oktober 2009 telah mencapai Rp 231,668 milyar. Artinya, 22,23 persen pendapatan utama Bank Riau digerogeti untuk kepentingan armada pegawainya. Efisiensi dan efektifitas manajemen kian mutlak diperlukan.***

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.